

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan wujud dari perencanaan dalam rangka pencapaian visi kepala daerah.

Dokumen perencanaan jangka menengah-lima tahunan (RPJMD) merupakan bagian dari dokumen perencanaan jangka panjang-dua puluh tahun atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Oleh karena itu, dokumen RPJMD harus selaras dengan dokumen RPJPD pada periode berkenaan. Sebagaimana diketahui, periode RPJMD Kota Cirebon saat ini memasuki tahap ketiga dalam RPJPD (2013-2018). Pada periode ini, prioritas pembangunan dititikberatkan pada peningkatan kualitas beragama, pendidikan, kesehatan, koperasi dan usaha kecil, dan prioritas lainnya sebagaimana telah dibahas pada bab terdahulu.

Adapun Visi Kota Cirebon 2013-2018 yang telah dicanangkan 2013-2018 adalah

**“ Terwujudnya Kota Cirebon Sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif
dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018”.**

Pernyataan visi tersebut memiliki 5 (lima) kata utama yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Cirebon pada akhir tahun 2018. Penjelasan masing-masing kata tersebut, adalah sebagai berikut:

Religius

Makna religius berarti bahwa Pemerintah dan Masyarakat Kota Cirebon dalam melaksanakan aktifitasnya baik dalam kehidupan keluarga, bertetangga maupun dalam pekerjaannya sehari-hari senantiasa berlandaskan pada norma dan syariat agama yang dianutnya. Sikap hidup yang religius adalah sikap hidup yang menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Ditinjau dari aspek historis, Kota Cirebon merupakan pusat penyebaran agama Islam dan tempat berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Kota Cirebon, merupakan tempat berkumpulnya para Wali Allah, dan menjadikannya sebagai tempat untuk menyusun strategi penyebaran Agama Islam di Pulau Jawa. Oleh karena itu tidak berlebihan rasanya jika Kota Cirebon dijuluki Kota Wali.

Namun demikian, menjalankan syariat agama tidak semata-mata berkaca pada aspek sejarah. Sebuah julukan saja tanpa pemahaman dan implementasi yang baik akan berakhir menjadi slogan belaka. Kita tentu tidak mengharapkan tempat ibadah yang telah dibangun secara mewah, hanya diisi oleh segelintir jemaah. Sebaliknya, kita sangat berharap dapat memakmurkan tempat ibadah dan lebih lanjut dapat menjadikan tempat ibadah sebagai basis pemberdayaan umat.

Dinamika kehidupan manusia yang berkembang pesat ditandai dengan arus globalisasi yang demikian deras menyebabkan tatanan etika dan moral kehidupan bermasyarakat, semakin terabaikan. Akan menjadi ironi apabila sebuah daerah dapat mencapai kemajuan fisik yang progresif namun angka kriminalitas, kenakalan remaja, korupsi, degradasi moral dan sebagainya masih tinggi. Hal ini mencerminkan pendidikan agama belum mencapai tahap implementatif.

Dalam aspek pemerintahan, birokrat sebagai pelayan masyarakat seyogyanya secara sungguh-sungguh dapat mengimplementasikan agama dalam menjalankan tugasnya. Sikap *Tawadhu* yang artinya rendah hati, dapat dimaknai dengan sikap pelayanan publik yang ramah dan sopan terhadap masyarakat. Sikap *Al-Hayaa'* yang berarti malu dalam melakukan sikap yang tidak terpuji, dapat mengendalikan aparatur pemerintah dari perbuatan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Dan banyak lagi, sikap yang diajarkan dalam agama yang perlu diimplementasikan dalam pelaksanaan pelayanan aparatur pemerintah dan menjadi sikap hidup sehari-hari.

Aman

Setiap individu manusia dalam melakukan kegiatannya membutuhkan karsa dan kreatifitas. Karsa yang berarti kemauan atau kehendak sedangkan kreatifitas berarti kemampuan atau proses mental untuk menciptakan ide dan gagasan baru. Kedua hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik jika kita memiliki rasa aman.

Kota Cirebon menjadi kota yang aman, yaitu kota yang bebas dari berbagai bahaya yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta penyakit – penyakit masyarakat (pekat). Dalam kondisi yang seperti itu, seluruh komponen masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan ini, maka upaya penciptaan kamtibmas secara optimal menjadi prioritas pembangunan, karena hal itu akan mempengaruhi kondusivitas bidang-bidang pembangunan lainnya. Dengan demikian, berbagai tindakan kriminal, kejahatan, pelanggaran, penyakit masyarakat (miras, perjudian, pelacur dll), keberandalan dan premanisme, aksi geng motor, perkelahian pelajar, pertikaian pemuda antar kampung, kesemrawutan parkir kendaraan, kemacetan lalu lintas dan kumuhnya kawasan perkotaan (gepeng, bangunan liar, kesemerawutan kawasan perkotaan dll), dapat dikurangi dan dihilangkan. Meskipun demikian, upaya penanganan dan penegakan peraturan dan kamtibmas tersebut seyogyanya dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi berdasar keadilan, kemasalahatan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terciptanya rasa aman, ketertiban umum dan keadilan akan menciptakan suasana kondusif yang memberikan kenyamanan dan keyakinan semua pihak, termasuk dalam mendorong pengembangan usaha dan peningkatan iklim investasi di kota Cirebon.

Maju

Kota Cirebon menjadi kota yang maju, artinya kota yang berkembang ke arah yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupannya. Kota yang maju adalah kota yang memiliki daya saing tinggi di dibandingkan dengan kemajuan kota-kota lain di kawasan regional maupun nasional. Untuk itu, pelaksanaan seluruh aspek pembangunan di kota Cirebon harus berorientasi pada kemajuan dan peningkatan daya saing di segala bidang, dengan berbasis pada sistem budaya dan kearifan lokal, yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Cirebon. Indikator kemajuan dapat dilihat secara material dan immaterial. Secara material, dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang

meningkat, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas sarana prasarana serta infra struktur penunjang lainnya. Sedangkan secara immaterial, kemajuan dapat dilihat dari semakin banyaknya suasana keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menunaikan ajaran agama dan aktivitas kehidupan sosial lainnya.

Aspiratif

Kota Cirebon menjadi kota yang aspiratif, yaitu kota yang berbasis pada aspirasi masyarakat. Dengan visi ini, maka perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan senantiasa memperhatikan aspirasi dan melibatkan unsur-unsur masyarakat. Berbagai unsur yang dapat diserap aspirasinya atau diminta keterlibatannya antara lain adalah pihak swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, pers/media, lembaga swadya masyarakat, kelompok perempuan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemangku adat, para budayawan, organisasi kemasyarakatan, dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

Kota yang aspiratif dapat mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik. Pimpinan pemerintah secara aktif dapat mengunduh dan mengakomodasi apa yang diinginkan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat dengan kesadaran dan tanggung jawabnya dapat mengajukan usul-usul atau menyampaikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif kepada pemerintah, sehingga masyarakat dan pemerintah bersinergi dalam membangun dan memajukan kota Cirebon. Dengan demikian, semua kebijakan dan karya pembangunan yang dihasilkan merupakan kebijakan dan hasil karya bersama, sebagai bagian dari upaya membangun rasa memiliki (*sence of belonging*) dan tanggung jawab (*sence of responsibility*) terhadap kota Cirebon tercinta.

Hijau

Kota Cirebon menjadi kota hijau, artinya kota yang rimbun, sejuk, bersih, dan asri. Dengan visi ini, maka pembangunan kota Cirebon senantiasa berorientasi dan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Taman-taman kotanya tampak indah dan asri, jalan-jalannya bersih, trotoarnya tertata rapih, halaman kantor dan perumahan-perumahannya hijau.

Panorama pemandangan lingkungan yang segar dan hijau akan menciptakan suasana segar, sejuk menawan, menenteramkan hati, mendorong gairah kerja, dan menarik para wisatawan dan usahawan untuk berlibur dan berinvestasi di kota Cirebon, dan seluruh warga masyarakatnya merasa betah tinggal di kota Cirebon.

5.2 Misi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian visi. Oleh karena itu pernyataan-pernyataan dalam misi harus menggambarkan upaya yang nyata dan terukur dalam rangka mewujudkan visi.

Pernyataan misi walaupun disampaikan dengan kalimat yang sederhana, namun didalamnya mengandung konsistensi upaya dan tanggung jawab yang sangat besar. Berhasil atau tidaknya pencapaian visi, sangat ditentukan oleh seberapa besar konsistensi kita terhadap pelaksanaan misi. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tidak semata-mata menjadi tanggung jawab

Walikota sebagai kepala daerah, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, karena pada hakekatnya kepala daerah merupakan representasi pemimpin yang dikehendaki masyarakat.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa Visi Kota Cirebon 2013-2018 menggambarkan suatu kondisi kota, masyarakat, dan pemerintah yang religius, aman, maju, partisipatif dan hijau, maka untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Misi Ke-1: “Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius”
- Misi Ke-2: “Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN”
- Misi Ke-3: “Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum”
- Misi Ke-4: “Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat”
- Misi Ke-5: “Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan”
- Misi Ke-6: “Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup”

5.2.1 Janji Kampanye Pasangan Terpilih Drs. H. Ano Sutrisno, MM dan Drs. Nasrudin Azis, SH.

Sebagaimana telah disampaikan, bahwa perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan *top down-bottom up*.

Semua pendekatan tersebut telah diaplikasikan dalam penyusunan RPJMD Kota Cirebon 2013-2018. Khusus mengenai pendekatan politis adalah merupakan janji pasangan terpilih Drs. H. Ano Sutrisno, MM. dan Drs. Nasrudin Azis, SH. pada saat kampanye, yang harus diintegrasikan dalam RPJMD. Secara garis besar, bidang-bidang yang akan menjadi fokus pembangunan dan disampaikan pada saat kampanye adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kesehatan
 - a. Puskesmas gratis untuk warga Kota Cirebon
 - b. Bantuan dana untuk PMT Posyandu dan Posbindu dinaikkan
 - c. Kader diberikan dana operasional
 - d. Timbangan untuk balita di Posyandu dibuat lebih aman dan menarik
 - e. Meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Gunung Jati
2. Bidang Pendidikan
 - a. SPP gratis untuk SD, SMP dan SMA
 - b. Penerimaan siswa baru sesuai Peraturan Walikota (penataan PPDB)
 - c. Tidak ada biaya untuk daftar ulang di setiap kelas
3. Bidang Sosial
 - a. Peningkatan bantuan pembangunan fisik dan non fisik RW
 - b. Peningkatan bantuan BOP bagi LKK (LPM, KT, PKK, RW, RT) dan kader
 - c. Peningkatan bantuan Rutilahu
 - d. Pemberian bantuan untuk imam masjid

4. Bidang Ekonomi
 - a. Mengembangkan koperasi berbasis masjid
 - b. Penataan dan pembinaan PKL, becak dan angkutan umum
 - c. Membangun gerakan bapak asuh bagi pengusaha kecil dan sektor informal
5. Infrastruktur
 - a. Pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan, kesehatan dan sarana umum
 - b. Perbaikan sarana lingkungan, selokan dan lain-lain
 - c. Peningkatan pembangunan sarana ibadah

Secara umum bidang pembangunan yang menjadi fokus pada saat kampanye tersebut adalah merupakan isu penting juga dalam model pendekatan perencanaan pembangunan lainnya. Dengan kata lain, isu strategis pembangunan di Kota Cirebon merupakan permasalahan yang dirasakan bersama oleh seluruh komponen masyarakat dan oleh karena itu keberhasilan penanganannya juga menjadi tanggung jawab bersama.

5.2.2 Keterkaitan Visi-Misi dan Isu Strategis

Visi-misi memiliki keterkaitan kuat dengan Isu-isu strategis yang telah dikemukakan pada bagian awal dokumen ini. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian visi-misi akan menjadi langkah nyata dalam penanganan isu-isu strategis di Kota Cirebon.

Keterkaitan visi, misi dan isu strategis Kota Cirebon 2008-2013 dituangkan dalam Tabel 5.1 berikut ini,

Tabel 5.1
Hubungan Visi, Misi dan Isu Strategis
Kota Cirebon 2013-2018

Visi	Misi	Isu Strategis
Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018	Misi-1 : Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius	Reformasi birokrasi
		Penyakit masyarakat
	Misi-2 : Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN	Pelayanan publik
		Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
		Profesionalisme aparatur
	Misi-3 : Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum	Penataan sektor informal
	Misi-4 : Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah
		Mutu tenaga pendidik
		Kesehatan lingkungan
		Perubahan iklim global
Perlindungan anak dan perempuan		
Indeks Daya Beli		
Budaya Lokal		
Kemiskinan		

Visi	Misi	Isu Strategis
	Misi-5 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Perencanaan partisipatif
	Misi-6: Mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan bagi warga kota	Pengelolaan sampah
		Pencemaran air, tanah dan udara
		Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Kerusakan lingkungan
		Banjir
Sarana perhubungan		

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang krusial dalam menerjemahkan Visi dan Misi Kota Cirebon 2013-2018 ke dalam langkah-langkah operasional.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan, untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah, dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dirumuskan dari penjelasan visi dan misi Kota Cirebon 2008-2013 yang kemudian dijabarkan dalam standar kinerja yang harus dicapai pada Sasaran.

Hasil perumusan tujuan dan sasaran disajikan pada Tabel 5.2 berikut ini,

Tabel 5.2
Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran
Kota Cirebon 2013-2018

Visi : "Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018"					
	Misi		Tujuan		Sasaran
1.	Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius	1.1	Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan	1.1.1	Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan
		1.2	Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada masyarakat	1.2.1	Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan
				1.2.2	Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan
				1.2.3	Terpeliharanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing
2.	Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN	2.1	Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur daerah, pencapaian target pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas APBD	2.1.1	Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional
				2.1.2	Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD
				2.1.3	Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah
				2.1.4	Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan
				2.1.5	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan

	Misi		Tujuan		Sasaran
		2.2	Meningkatkan penataan struktur dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah agar berfungsi optimal	2.2.1	Terwujudnya kesesuaian struktur dan tatalaksana SKPD
		2.3	Membangun suasana pemerintahan yang harmonis, mangayomi dan komunikatif	2.3.1	Tercapainya kesepakatan penetapan batas wilayah dengan Kabupaten Cirebon
		2.4	Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel	2.4.1	Penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
3.	Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum	3.1	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta bangsa dan tanah air Indonesia	3.1.1	Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam Bhineka Tunggal Ika
		3.2	Meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran hukum masyarakat	3.2.1	Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum
		3.3	Menegakkan peraturan dan perundang-undangan	3.3.1	Menurunnya tingkat pelanggaran perda
		3.4	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam aspek kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan.	3.4.1	Terwujudnya RW K-3
		3.5	Meningkatkan tertib lalu lintas dan perpikiran	3.5.1	Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan
		3.6	Meningkatkan penataan sektor informal untuk mendukung ketertiban dan keindahan kota	3.6.1	Tertatanya sektor informal
		3.7	Meningkatkan daya tanggap pemerintah dan masyarakat terhadap situasi bencana	3.7.1	Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat	Bidang Pendidikan			
		4.1	Mengoptimalkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat	4.1.1	Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan
		Bidang Kesehatan			
		4.2	Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat	4.2.1	Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat
				4.2.2	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk
		Bidang Pemuda dan Olah Raga			
		4.3	Meningkatkan olah raga prestasi	4.3.1	Berprestasi di tingkat propinsi
		4.4	Mewujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Pusaka	4.4.1	Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan
		Bidang Ekonomi			
		4.5	Meningkatkan daya beli masyarakat	4.5.1	Meningkatnya indeks daya beli masyarakat
		Kemiskinan			
		4.6	Menurunkan jumlah keluarga miskin	4.6.1	Menurunnya jumlah KK miskin
		Bidang Sosial			
		4.7	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	4.7.1	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		4.8	Meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	4.8.1	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
		4.9	Meningkatkan pengarusutamaan gender	4.9.1	Terpenuhinya kesetaraan gender
5	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	5.1	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	5.1.1	Meningkatnya Proporsi Pembiayaan Pembangunan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan
				5.1.2	Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Stimulan / Bantuan RW
6	Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup	6.1	Mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan bagi warga kota	6.1.1	Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal permukiman

Misi	Tujuan	Sasaran		
		6.1.2	Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup	
		6.1.3	Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA	
		6.2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	
			6.2.1	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat
			6.2.2	Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim
			6.2.3	Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal
			6.2.4	Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Minum
	6.3	Meningkatkan keserasian pembangunan terhadap Tata Ruang Kota	6.3.1	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten
			6.4	Meningkatkan sarana prasarana penunjang perumahan rakyat dan perhubungan
			6.4.1	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
			6.4.2	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni
			6.4.3	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang

Adapun untuk memperjelas target yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD, kami sajikan hubungan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target awal tahun 2012 dan kondisi akhir pelaksanaan tahun 2018, diuraikan per Misi dalam Tabel 5.3

Tabel 5.3
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kota Cirebon 2013-2018

Visi : “Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018”

Misi 1. Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal (tahun 2012)	Kondisi Akhir (tahun 2018)
1.1 Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan	1.1.1 Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan	1.1.1.1 Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD	0%	100%
1.2 Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada masyarakat	1.2.1 Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan	1.2.1.1 Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya.	30%	10%
	1.2.2 Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan	1.2.2.1 Prestasi lomba keagamaan 3 besar tingkat provinsi	N/A	3 besar tingkat propinsi
	1.2.3 Terpeliharanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing	1.2.3.1 Tidak adanya kasus konflik yang bernuansa agama	0 kasus	0 kasus

Misi 2. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal (tahun 2012)	Kondisi Akhir (tahun 2018)
2,1 Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur daerah, pencapaian target pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas APBD	2.1.1 Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional	2.1.1.1 Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	80%	100%
		2.1.1.2 Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS	9/1000 PNS	3/1000 PNS
	2.1.2 Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD	2.1.2.1 Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018	WDP	WTP
		2.1.2.2 Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100 %	71%	100%
	2.1.3 Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah	2.1.3.1 Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	3/70	18/70
		2.1.3.2 Meningkatnya arsip vital dan arsip statis	530 arsip digital	1060 arsip digital
	2.1.4 Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan	2.1.4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan	75 poin	95 poin
		2.1.4.2 Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon	484.695.035.000	550.000.000.000
	2.1.5 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.1.5.1 Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan	80 poin	90 poin
	2,2 Meningkatkan penataan struktur dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah agar berfungsi optimal	2.2.1 Terwujudnya kesesuaian struktur dan tatalaksana SKPD	2.2.1.1 Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018	76%
2,3 Membangun suasana pemerintahan yang harmonis, mengayomi dan komunikatif	2.3.1 Terwujudnya hubungan pemerintahan dan masyarakat yang harmonis	2.3.1.1 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan sebesar 95 %	75%	95%
	2.3.2 Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan Kabupaten Cirebon	2.3.2.1 Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100 %	72%	100%
2.4 Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntable	2.4.1 Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	2.4.1.1 Tersedianya peraturan-peraturan tentang e-government 100%	80 % (20 peraturan e government)	100 % (25 peraturan e government)
		2.4.1.2 Terpenuhinya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%	15 Sistem yang terbangun	17 Sistem yang terbangun

Misi 3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal (tahun 2012)	Kondisi Akhir (tahun 2018)
3.1 Meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta bangsa dan tanah air Indonesia	3.1.1 Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam kebhineka tunggal ika-an	3.1.1.1 Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama 0 kasus	0 kasus	0 kasus
3.2 Meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran hukum masyarakat	3.2.1 Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum	3.2.1.2 Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik	45 titik	10 titik
3.3 Menegakkan peraturan dan perundang-undangan	3.3.1 Menurunnya tingkat pelanggaran perda	3.3.1.1 Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 Perda bisa ditegakkan	10 kasus	5 kasus
3.4 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam aspek kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan Kota Cirebon	3.4.1 Terwujudnya RW K-3	3.4.1.1 Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50 %	10%	50%
3.5 Meningkatkan tertib lalu lintas dan perpikiran	3.5.1 Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	3.5.1.1 Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan	11 titik rawan kemacetan dan 5 titik rawan kecelakaan	5 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan
3.6 Meningkatkan penataan sektor informal untuk mendukung ketertiban dan keindahan kota	3.6.1 Tertatanya sektor informal	3.6.1.1 Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan dibagi/jumlah PKL seluruhnya = 0.3	60%	30%
3.7 Meningkatkan daya tanggap pemerintah dan masyarakat terhadap situasi bencana	3.7.1 Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana	3.7.1.1 Tingkat waktu tanggap kejadian bencana dan waktu tanggap darurat bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari

Misi 4. Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal (tahun 2012)	Kondisi Akhir (tahun 2018)
4.1 Mengoptimalkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat	4.1.1 Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan	4.1.1.1 Meningkatnya Lama Harapan Sekolah pada usia max 18 tahun	13 tahun di tahun 2011	18 tahun
		4.1.1.2 Rata - rata lama sekolah (13 Tahun)	10,86 tahun 2011	13 tahun
4.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4.2.1 Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat	4.2.1.1 Angka harapan hidup 71,1 tahun	69,8 tahun 2011	71,1 tahun
	4.2.2 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	4.2.2.1 Meningkatnya Peserta KB Aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS	60%	75%
4.3 Meningkatkan olah raga prestasi	4.3.1 Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat propinsi	4.3.1.1 Meraih posisi 10 besar tingkat propinsi di tahun 2018	Peringkat 18	Peringkat 10 besar
4.4 Mewujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Pusaka	4.4.1 Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan	4.4.1.1 Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012	30%	50%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal (tahun 2012)	Kondisi Akhir (tahun 2018)
		4.4.1.2 Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 Jenis (72 bangunan cagar budaya di th 2012)	72	80
4.5 Meningkatkan daya beli masyarakat	4.5.1 Meningkatnya indeks daya beli masyarakat	4.5.1.1 Indeks daya beli	62,35 tahun 2011	65
		4.5.1.2 Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018	355.967 orang	444.959 orang
4.6 Menurunkan jumlah keluarga miskin	4.6.1 Menurunnya jumlah KK miskin	4.6.1.1 rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota	30,24 % tahun 2010	25%
4.7 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	4.7.1 Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	4.7.1.1 Jumlah kasus	30 kasus	20 kasus
4.8 Meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	4.8.1 Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	4.8.1.1 Penurunan PMKS 5 % di tahun 2018	30.895 orang	28.456 orang
4.9 Meningkatkan pengarus utamaan gender	4.9.1 Terpenuhinya kesetaraan gender	4.9.1.1 Rasio gender diatas 30% perempuan	30%	40%

Misi 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal (tahun 2012)	Kondisi Akhir (tahun 2018)
5.1 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	5.1.1 Meningkatnya Proporsi Pembiayaan Pembangunan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan	5.1.1.1 Persentase kenaikan nilai Musrenbang Kecamatan yg diakomodir dalam APBD sebanyak 5 % sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)	Rp. 15 milyar rupiah atau 1,5 % dari nilai total APBD	5 % dari nilai total APBD tahun 2018
	5.1.2 Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Stimulan / Bantuan RW	5.1.2.1 Prosentase Swadaya Masyarakat sebesar 10 % terhadap jumlah bantuan RW	rata-rata 3 %	10%

Misi 6. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal (tahun 2012)	Kondisi Akhir (tahun 2018)
6.1 Mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan bagi warga kota	6.1.1 Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal permakaman	6.1.1.1 luas ruang terbuka hijau publik menuju 12 % pada akhir tahun 2018	9,80%	12%
		6.1.2.1 Luas wilayah permakaman bertambah 2 Ha	30 ha	32 ha
		6.1.1.2 Jumlah Taman publik yang ditata 80% pada akhir tahun	60%	80%
	6.1.2 Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup	6.1.2.1 Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome)	82 %	90 %
		6.1.2.2 Prosentase ketaatan pelaku usaha terhadap baku mutu lingkungan % (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau di kali 100%)	60 %	78 %

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal (tahun 2012)	Kondisi Akhir (tahun 2018)
		6.1.2.3 Meningkatkan pelayanan Konservasi SDA (Rata-rata Outcome)	0 %	100 %
		6.1.2.4 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome)	28 %	80 %
	6.1.3 Meningkatkan pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA	6.1.3.1 Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%	70%	80%
		6.1.3.2 Rasio pengelolaan sampah berbasis RW Zero waste 20 %	1%	20%
6.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	6.2.1 Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	6.2.1.1 Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%	96,80%	100%
		6.2.1.2 Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100 %	90%	100%
	6.2.2 Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim	6.2.2.1 Berkurangnya Titik Rawan Genangan Banjir dari 18 titik menjadi 10 titik	18 titik	10 titik
	6.2.3 Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal	6.2.3.1 Cakupan pelayanan air limbah domestik	92%	100%
		6.2.3.2 Jumlah jamban dan septiktank 76, 45 % (65.766 Rumah Tangga)	65%	76,45%
6.2.4 Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Minum	6.2.4.1 Cakupan pelayanan air minum non perpipaan	4 %	20%	
6.3 Meningkatkan keserasian pembangunan terhadap Tata Ruang Kota	6.3.1 Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	6.3.1.1 Tingkat pelanggaran tata ruang (menurun)	35 kasus	0 kasus
6.4 Meningkatkan sarana prasarana penunjang perumahan rakyat dan perhubungan	6.4.1 Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan	6.4.1.1 berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20 %	30%	20%
	6.4.2 Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	6.4.2.1 Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah	18.456 rumah	10.000 rumah
	6.4.3 Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	6.4.3.1 Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	80%	100%